



Koperasi sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Evi Novita Sari¹, Nor Cahya Lailina², Aini Zaqiyah³, Nurussobakh⁴

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara, Kota Pasuruan, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email: evin7698@gmail.com, norcahyalailina@gmail.com, azaqiyah7@gmail.com, nurussobakh2020@gmail.com

Diterima: 02-05-2026 | Disetujui: 07-05-2026 | Diterbitkan: 09-05-2026

ABSTRACT

Cooperatives are one of the economic institutions that play a strategic role in efforts to empower the community's economy. The principles of togetherness, kinship, and member participation make cooperatives a forum capable of strengthening the community's economy, especially small and medium-sized enterprises. However, there are still various economic problems in the community such as limited capital, low access to markets, and lack of business management skills. These conditions make it difficult for the community to develop their businesses optimally. The purpose of writing this article is to analyze the role of cooperatives as a solution for community economic empowerment. The method used is a literature study by examining various relevant scientific sources. The study results show that cooperatives play a role in increasing access to capital, developing members' businesses, creating jobs, and improving community welfare. Therefore, cooperatives can become a solution in community economic empowerment if managed professionally and supported by active member participation.

Keywords: Cooperative; Economic Empowerment; Community.

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan partisipasi anggota menjadikan koperasi sebagai wadah yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil dan menengah. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pasar, serta kurangnya kemampuan pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit mengembangkan usaha secara optimal. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi berperan dalam meningkatkan akses permodalan, mengembangkan usaha anggota, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh partisipasi aktif anggota.

Katakunci: Koperasi; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari, E. N., Lailina, N. C., Zaqiyah, A., & Sobakh, N. (2026). Koperasi Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1062-1074. <https://doi.org/10.63822/0xzfjw15>

PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya produktif.

Salah satu lembaga ekonomi yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota (AZIZAH, 2022).

Koperasi menjadi alat strategis bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian seperti kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menyediakan akses keuangan dan pelatihan bagi masyarakat. Koperasi berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mendukung anggotanya untuk tetap bersaing di era digital, terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks ini, koperasi berperan bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai komponen penting dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya menjadi alat strategis bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian seperti kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menyediakan akses keuangan dan pelatihan bagi masyarakat. Koperasi berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mendukung anggotanya untuk tetap bersaing di era digital, terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks ini, koperasi berperan bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai komponen penting dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya (MeliaMufiani, 2025) Dengan demikian, koperasi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti batasan regulasi, sulitnya akses keuangan, rendahnya keterampilan manajerial, dan kurangnya partisipasi dari anggota. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan kelembagaan koperasi agar dapat berfungsi secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi sebagai solusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research) yang berorientasi pada penguatan landasan teoritis dan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan secara kritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah terakreditasi, prosiding, buku akademik, serta laporan resmi lembaga terkait yang dipublikasikan dalam kurun waktu terbaru dan memiliki validitas ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan langkah-langkah sistematis, yaitu identifikasi literatur, klasifikasi sumber berdasarkan relevansi, serta evaluasi kualitas sumber menggunakan kriteria kredibilitas, aktualitas, dan objektivitas.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk memudahkan interpretasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis berbagai temuan penelitian terdahulu dengan pendekatan komparatif dan integratif, sehingga mampu mengidentifikasi pola hubungan, memperkuat argumentasi teoritis, serta menemukan kesenjangan penelitian (research gap). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, dan memenuhi kaidah ilmiah dalam menjelaskan peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat dan Urgensi Pemberdayaan

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang memiliki banyak penduduk seperti Indonesia adalah kemiskinan. Indonesia memiliki kasus kemiskinan paling tinggi, berada di urutan ke-5 di ASEAN dalam daftar negara yang menghadapi krisis kemiskinan. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, angka kemiskinan tetap tinggi, mencakup kedua sektor perkotaan dan perdesaan. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan, dan menawarkan program pelatihan kejuruan untuk masyarakat. namun pengurangan angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang sulit diatasi. (Antonius Ary Setyawan, 2025)

Kebijakan pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak jauh dari pembangunan sumber daya manusia (masyarakat) itu sendiri, yang mengandung arti sebagai usaha sadar dan terarah yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka (Mala et al., 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut. Pemberdayaan merupakan salah satu konsep alternatif dalam meningkatkan kemampuan dan martabat agar terlepas dari permasalahan, seperti kurangnya inovasi, kemiskinan, kreativitas, keterbelakangan, dan aksesibilitas yang mengacu pada suatu kelompok atau individu. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat pada

mulanya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek. Konsep ini menampakkan kecenderungan bahwa pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya (Antonius Ary Setyawan, 2025).

2. Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomj Masyarakat

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi. Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan. Seiring dengan perubahan tata perekonomian global, berakibat pula terhadap paradigma dan tantangan perkoprasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian. Setelah beberapa kali diadakan seminar dan perdebatan yang cukup panjang, Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 yang sudah lebih dua puluh lima tahun berlaku diperbarui dengan Undang Undang No.17 Tahun 2012. Undang–Undang No.17 Tahun 2012 ini dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan keadaan perekonomian global yang bergerak cepat dan semakin dinamis, agar koperasi dapat melakukan penyesuaian dan penetrasi ekonomi di pasar global, bukan merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. (Rohma, 2015)

Tujuan koperasi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memberikan perhatian khusus pada aspek material dan spiritual. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mendorong perkembangan positif dalam kehidupan pribadi dan kolektif para anggota serta masyarakat umum. Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai perkumpulan orang orang, bukan sekadar kumpulan modal. Ini mengindikasikan bahwa aspek sosial dan keanggotaan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan semata-mata fokus pada modal. Oleh karena itu, laba bukanlah ukuran utama kesejahteraan anggota, melainkan manfaat yang diterima oleh anggota.

Prinsip prioritas manfaat bagi anggota di atas keuntungan insial menjadi dasar bagi koperasi Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat yang maksimal kepada anggota, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggota. Meskipun manfaat anggota menjadi fokus utama, pernyataan menekankan perlunya hati-hati agar kerja sama di dalam koperasi tidak berkurang. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberikan manfaat dan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional koperasi. Pencapaian tujuan utama dilakukan melalui kerja dan pelayanan yang disesuaikan dengan masing-masing anggota. Ini menekankan pentingnya personalisasi pendekatan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi unik dari setiap anggota koperasi. Selain tujuan kesejahteraan anggota, koperasi Indonesia juga bertujuan memberdayakan masyarakat luas. Kontribusi koperasi tidak hanya terbatas pada anggotanya tetapi juga ditujukan untuk kemajuan materiil dan spiritual masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota koperasi Indonesia didorong oleh rasa solidaritas yang kuat dan motivasi yang berasal dari nilai-nilai bersama. Ini menunjukkan bahwa kesatuan

dalam koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan dan nilai-nilai yang diterima bersama oleh anggotanya.

Perkembangan dan kemajuan UMKM tidak hanya ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri, tetapi juga dukungan dari pihak eksternal terutama kebutuhan akan modal. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangannya di antaranya adalah lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran (Faolina, 2017). Koperasi yang dapat membantu serta mendampingi pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan. (Widiyanti & Sunindhia, 2016) Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia tumbuh secara bertahap. Sikap dan keinginan saling membantu di antara para anggota menjadi kunci keberhasilan gerakan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Sistem pengelolaan yang dijalankan dengan landasan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan membawa koperasi simpan pinjam menjadi sebuah lembaga keuangan non bank yang mampu membantu sektor usaha mikro, untuk mengatasi masalah pendanaan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Wihelmina Mitan, 2023)

Selain menyediakan modal bagi UMKM koperasi juga menyelenggarakan pelatihan bagi anggotanya, pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi juga membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan manajemen, perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha yang lebih stabil. Dengan akses ke modal dan pelatihan, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan volume penjualan. Koperasi membantu anggotanya dalam menjalin hubungan dengan distributor dan pasar baru, baik lokal maupun internasional. Ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka ke audiens yang lebih luas, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat memungkinkan UMKM untuk melakukan reinvestasi dalam bisnis mereka, memperluas skala operasi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pemilik serta karyawan mereka. (Ripho Delzy Perkasa, 2024)

3. Tantangan Koperasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki sejarah panjang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan koperasi tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh penting seperti Robert Owen di Skotlandia yang memperkenalkan konsep koperasi pada akhir abad ke-18, serta William King yang mengembangkan ide tersebut melalui pendirian toko koperasi dan penerbitan *The Cooperator*. Gerakan koperasi kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Rivangga Nur Ardiansyah dkk., 2023). Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja pada tahun 1896 di Purwokerto, dengan tujuan membantu masyarakat yang terjerat hutang rentenir. Perkembangan koperasi semakin diperkuat oleh dukungan Mohammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi, gerakan koperasi di Indonesia dimulai pada Kongres Koperasi pertama pada 12 Juli 1947 (Ardiansyah dkk., 2023).

Secara yuridis, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang berlandaskan prinsip kekeluargaan. Koperasi juga berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, koperasi menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa melihat besar kecilnya modal yang dimiliki (Ardiansyah dkk., 2023). Dalam proses pendiriannya, koperasi memerlukan perencanaan yang matang, seperti penyusunan AD/ART, pemenuhan persyaratan legalitas, serta kesiapan modal dan rencana usaha. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya sekadar organisasi sosial, tetapi juga lembaga ekonomi yang membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan secara optimal (Ardiansyah dkk., 2023).

Namun, dalam pelaksanaannya, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Meskipun koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, kenyataannya tidak semua koperasi mampu berkembang dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan modal, lemahnya pengelolaan organisasi, serta kurangnya partisipasi aktif dari anggota (Ardiansyah dkk., 2023).

Selain itu, dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin modern, koperasi juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal inovasi dan penguasaan pasar. Tanpa adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen yang profesional, koperasi akan sulit bersaing dengan badan usaha lainnya (Ardiansyah dkk., 2023). Dari sisi kelembagaan, koperasi juga masih menghadapi kendala dalam hal regulasi dan pengawasan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi di lapangan seringkali belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara maksimal (Ardiansyah dkk., 2023).

Dengan demikian, meskipun koperasi memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Upaya perbaikan dalam aspek manajemen, partisipasi anggota, permodalan, serta dukungan kebijakan menjadi kunci agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi anggota juga menjadi salah satu tantangan utama dalam koperasi. Meskipun secara prinsip koperasi menjunjung tinggi demokrasi ekonomi, pada kenyataannya tidak semua anggota aktif dalam kegiatan maupun pengambilan keputusan. Banyak anggota yang hanya berperan sebagai pengguna layanan tanpa ikut berkontribusi dalam pengembangan koperasi. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan koperasi karena kurangnya keterlibatan anggota dalam memberikan ide, pengawasan, maupun dukungan terhadap program yang dijalankan. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi juga masih menjadi kendala. Tidak sedikit koperasi yang dikelola secara kurang profesional, baik dalam hal manajemen keuangan, perencanaan usaha, maupun pengembangan strategi. Keterbatasan kemampuan pengurus dalam berinovasi serta minimnya pelatihan menyebabkan koperasi sulit berkembang dan bersaing dengan badan usaha lain yang lebih modern dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelola koperasi sangat diperlukan.

Tantangan lainnya terletak pada keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi. Di era digital seperti sekarang, koperasi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam operasional dan pemasaran. Namun, masih banyak koperasi yang belum mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi, sehingga kalah bersaing dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan

dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga terkait, untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas digital serta memperluas jaringan usahanya agar tetap relevan di tengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Keterbatasan akses terhadap jaringan kemitraan juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan koperasi. Banyak koperasi yang masih berjalan secara mandiri tanpa menjalin kerja sama strategis dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan, pemerintah, maupun sektor swasta. Padahal, kemitraan yang kuat dapat membantu koperasi dalam memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks (Agil Dzirkullah & Chasanah, 2024).

Selain itu, rendahnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan juga menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Di era modern yang serba cepat, koperasi dituntut untuk mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, masih banyak koperasi yang cenderung mempertahankan pola lama tanpa melakukan pembaruan. Hal ini menyebabkan koperasi sulit menarik minat generasi muda untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi (Fernandi, 2024).

4. Strategi Penguatan Koperasi sebagai Solusi Ekonomi

a. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor fundamental dalam menentukan keberhasilan koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota. SDM yang kompeten akan mampu mengelola koperasi secara profesional, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong inovasi dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan koperasi.

1) Pelatihan Manajemen Usaha

Pelatihan manajemen usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengurus koperasi. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan usaha, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan operasional, serta evaluasi kinerja usaha. Melalui pelatihan manajemen, pengurus koperasi dapat memahami pentingnya penyusunan rencana bisnis yang terarah, pengelolaan keuangan yang sistematis, serta pengendalian operasional yang efektif. Hal ini sangat penting karena masih banyak koperasi yang mengalami kendala dalam pengelolaan akibat kurangnya pemahaman manajerial. Selain itu, pelatihan manajemen juga mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang terstruktur dan berbasis sistem terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta kinerja usaha koperasi (Sailendra et al., 2021). Dengan demikian, pelatihan manajemen usaha tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis pengurus, tetapi juga memperkuat kelembagaan koperasi secara keseluruhan.

2) Pendidikan Kewirausahaan bagi Anggota

Pendidikan kewirausahaan merupakan upaya penting dalam menumbuhkan jiwa usaha di kalangan anggota koperasi. Melalui pendidikan ini, anggota didorong untuk memiliki pola pikir kreatif, inovatif, serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang usaha. Anggota yang memiliki jiwa kewirausahaan akan lebih aktif dalam mengembangkan usaha produktif, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan anggota serta pertumbuhan ekonomi koperasi.

Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga berperan dalam meningkatkan kemandirian anggota, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Koperasi yang anggotanya aktif dan

produktif cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas anggota melalui kewirausahaan juga sejalan dengan upaya transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan kompetitif (Andani et al., 2025).

b. Digitalisasi Koperasi

Digitalisasi koperasi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi pengelolaan koperasi di era perkembangan teknologi informasi. Transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan kepada anggota.

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam koperasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem informasi manajemen, aplikasi keuangan digital, serta penggunaan platform komunikasi berbasis daring. Sistem ini memungkinkan koperasi untuk mengelola data anggota, transaksi keuangan, serta kegiatan usaha secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, teknologi informasi juga memudahkan pengurus dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja koperasi secara real-time. Hal ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Penerapan teknologi informasi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi, sehingga anggota dapat mengakses informasi secara lebih terbuka. Digitalisasi terbukti mampu memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan anggota terhadap koperasi (Hamdani & Hidayat, 2024).

2) Pemasaran Digital dan Pencatatan Keuangan Modern

Pemasaran digital menjadi salah satu strategi efektif dalam memperluas jangkauan pasar koperasi. Dengan memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce, koperasi dapat mempromosikan produk dan layanan secara lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis. Penggunaan pemasaran digital juga memungkinkan koperasi untuk menjangkau konsumen baru serta meningkatkan volume penjualan. Selain itu, strategi ini relatif lebih efisien dari segi biaya dibandingkan pemasaran konvensional. Di sisi lain, penerapan pencatatan keuangan modern berbasis digital memungkinkan koperasi untuk mengelola keuangan secara lebih profesional. Sistem ini mendukung pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time, sehingga meminimalkan kesalahan serta meningkatkan akurasi laporan keuangan. Pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja usaha koperasi (Sailendra et al., 2021). Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi (Indriastuti et al., 2025).

c. Dukungan Pemerintah dan Swasta

Peran pemerintah dan sektor swasta merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam mendukung penguatan koperasi secara berkelanjutan. Sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota, koperasi kerap menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal permodalan, penguasaan

teknologi, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Oleh sebab itu, keterlibatan pihak eksternal menjadi sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan koperasi.

1) **Bantuan Modal Usaha**

Ketersediaan modal usaha merupakan salah satu aspek krusial dalam menunjang pertumbuhan koperasi. Dengan dukungan modal yang memadai, koperasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta memperbaiki kualitas produk maupun layanan yang ditawarkan. Keterbatasan modal sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan koperasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan hibah, maupun subsidi. Adanya akses terhadap sumber permodalan tersebut membuka peluang bagi koperasi untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Selain itu, modal juga dapat dimanfaatkan untuk investasi pada teknologi serta pengembangan unit usaha baru.

Namun demikian, pengelolaan modal harus dilakukan secara hati-hati dan profesional agar tidak menimbulkan permasalahan keuangan di kemudian hari. Pengelolaan keuangan yang baik terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja usaha koperasi (Sailendra et al., 2021).

2) **Kemitraan dengan Sektor Swasta**

Kerja sama dengan sektor swasta merupakan salah satu strategi efektif dalam memperkuat posisi koperasi. Melalui kemitraan ini, koperasi dapat memperoleh akses terhadap teknologi modern, jaringan distribusi yang lebih luas, serta peluang pasar yang lebih besar. Selain itu, kerja sama tersebut juga membuka peluang terjadinya alih pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola koperasi. Kemitraan juga berperan dalam meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar yang berlaku. Sebagai contoh, koperasi yang menjalin kerja sama dengan perusahaan besar dapat memanfaatkan sistem distribusi yang lebih efisien serta memperluas jangkauan pemasaran produk. Hubungan kemitraan yang terjalin dengan baik akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing koperasi secara keseluruhan (Andani et al., 2025).

3) **Pendampingan Berkelanjutan**

Pendampingan secara berkelanjutan merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan program penguatan koperasi. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas manajerial, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan strategi pemasaran. Pelaksanaan pendampingan secara konsisten akan membantu koperasi dalam memperkuat kelembagaan serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Selain itu, pendampingan juga memberikan arahan praktis dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pengelolaan koperasi (Andani et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan pendampingan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.

d. Penguatan Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berbasis pada prinsip kebersamaan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari anggota, koperasi akan sulit berkembang secara optimal.

1) **Transparansi Pengelolaan Koperasi**

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi anggota. Transparansi memungkinkan anggota untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan serta kinerja koperasi. Upaya transparansi dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan secara terbuka serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem informasi koperasi. Dengan adanya sistem digital, anggota dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi (Indriastuti et al., 2025).

2) Peningkatan Kepercayaan Anggota

Kepercayaan anggota merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam koperasi. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui pengelolaan yang profesional, akuntabel, serta konsisten dalam menjalankan kegiatan koperasi. Anggota yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi, baik dalam kegiatan organisasi maupun dalam pemanfaatan layanan koperasi. Selain itu, kepercayaan juga berkontribusi terhadap loyalitas anggota dalam jangka panjang. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat berdampak pada menurunnya partisipasi anggota dan berpotensi menghambat perkembangan koperasi. Oleh karena itu, pengurus koperasi perlu menjaga integritas serta transparansi dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

5. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi yang besar sebagai instrumen ekonomi inklusif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dapat berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan (Andani et al., 2025). Selain itu, pengelolaan koperasi yang profesional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Koperasi yang dikelola dengan baik akan lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks.

Di sisi lain, penerapan digitalisasi dalam koperasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi operasional serta perluasan akses pasar. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan kinerja usaha serta transparansi dalam pengelolaan keuangan (Hamdani & Hidayat, 2024). Transparansi dan kepercayaan anggota juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Koperasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih stabil dan mampu berkembang dalam jangka panjang (Indriastuti et al., 2025). Dengan demikian, strategi penguatan koperasi yang mencakup peningkatan kualitas SDM, digitalisasi, dukungan eksternal, serta partisipasi anggota akan mampu menjadikan koperasi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan, mengembangkan usaha anggota, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah sosial yang mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan partisipasi aktif anggota. Namun, dalam implementasinya, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya partisipasi anggota. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh pengelolaan yang profesional, dukungan dari berbagai pihak, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. N., dkk. (2023). Peran dan tantangan koperasi sebagai solusi permodalan UMKM di Indonesia.
- Fernandi, D. (2024). Peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5).
- Kartika, S., Afif, A., & Febriati. (2024). Analisis sistem pengendalian kredit pada koperasi. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 4(1). <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i1.460>
- Maulida, D. R. W., dkk. (2024). Dinamika keterlekatan ekonomi: Hubungan UMKM dengan koperasi simpan pinjam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.404>
- Nasution, S., dkk. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.160>
- Hamdani, D., & Hidayat, U. (2024). Pelatihan digitalisasi koperasi pada KSPPS Surya Amanah Ummah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *E-Coops-Day*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/4698>
- Sailendra, S., Djaddang, S., Syam, M., Susilawati, S., & Nungki, P. (2021). Tatakelola keuangan UMKM berbasis ETAP dan Android untuk meningkatkan efisiensi kinerja usaha pada era Covid-19 normal baru. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/2058>
- Indriastuti, D. R., Susanti, R., Wulandari, R., & Intan, J. (2025). Building public trust in cooperatives through digitalization. *Journal of Management and Digital Business*. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jmdb/article/view/1410>
- Andani, L., Aziz, N., Firmadi, S., Auliya, S., & Salsabila, S. (2025). Transformasi koperasi melalui strategi terintegrasi dan berkelanjutan: Good corporate governance (GCG), sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan (SIAPIK), dan social media promotion. *Journal of Community Empowerment*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce/article/view/34010>
- Antonius Ary Setyawan, E. D. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 10.
- Perkasa, R. D., & A. R. (2024). Peranan koperasi dalam mendukung permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Mestika). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 10.

- Rohma, A. B. (2015). Analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10.
- Mitan, W., & P. L. (2023). Peranan koperasi simpan pinjam Kopdit Sube Huter Nita dalam mendukung permodalan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Nita. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 17.
- Agil Dzikrullah, M., & Chasanah, U. (2024). Strategi pengembangan koperasi dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 115–128.
- olina, E. (2017). Analisis permasalahan UMKM dan peran koperasi sebagai solusi pembiayaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(2), 89–97.